KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
POLRES TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanjungpinang, Februari 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …… 1
B. Tugas dan Fungsi ……..…….. 3
C. Struktur Organisasi …… 5
D. Permasalahan ……..... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Polres Tanjungpinang …….. 8
1. Visi Polres Tanjungpinang ……. 9
2. Misi Polres Tanjungpinang …… 9
3 Tujuan Polres Tanjungpinang ……... 9
4. Sasaran Strategis Polres Tanjungpinang..... 10
B. Perjanjian Kinerja Polres Tanjungpinang……. 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi …….. 13
B. Indikator Capaian Indikator Kinerja..... 15
C. Realisasi Anggaran …… 36

Bab IV PENUTUP …… 41

Lampiran-lampiran

- Perjanjian Kinerja
- Struktur Organisasi
- Foto-foto kegiatan Tahun 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
POLRES TANJUNGPINANG TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Resor Tanjungpinang yang merupakan unsur pelaksana utama Polda Kepulauan Riau, mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi - fungsi Polri dan pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam menciptakan situasi kamtibmas kondusif bagi kepentingan masyarakat. Wilayah tugas Kepolisian Resor Tanjungpinang meliputi wilayah Tanjungpinang, Tanjungpinang merupakan wilayah wisata yang banyak diminati para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kota Tanjungpinang tidak memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain dan Kota Tanjungpinang sebagai Wilayah Hukum Polres Tanjungpinang memiliki batas wilayah sebagai berikut : Sebelah utara dengan Kecamatan Bintan Utara (Kabupaten Bintan) dan kota Batam, Sebelah selatan dengan Kecamatan Bintan Timur (Kabupaten Bintan), Sebelah Timur dengan Kecamatan Bintan Timur (Kabupaten Bintan) dan Sebelah Barat dengan Kecamatan Galang (Kota Batam). Khusus Kota Tanjungpinang dengan luas wilayah mencapai 144,56 Km² keadaan Geologis sebagai wilayah Kota ini berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut dan terbagi dalam 4 wilayah Kecamatan Serta 18 wilayah kelurahan, dan berdasarkan BPS Kota Tanjungpinang tahun 2020 jumlah penduduk Kota Tanjungpinang adalah 227,663 jiwa.

Gambaran gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Tanjungpinang dengan trend terjadinya kejahatan yang bersifat umum termasuk kejahatan transnasional dan juga pencurian kekayaan alam serta gangguan kamtibmas lainnya yang sering terjadi yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum, pembakaran dan kebakaran, pemalsuan mata uang, perkosaan, perjudian, prostitusi, traficking / perdagangan

wanita…..

wanita, KDRT, curanmor, pembunuhan, penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, narkoba, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak, unjuk rasa, imigran gelap, TKI ilegal dan kontijensi yaitu gangguan kamtibmas lainnya yang sulit di prediksi.

Rencana Kerja Polri tahun 2021 merupakan rencana kerja atau dokumen perencanaan ditingkat Kementrian / Lembaga untuk periode satu tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis Polri dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor.20/2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Rencana Kerja Polres Tanjungpinang tahun 2021 merupakan rencana kerja atau dokumen perencanaan ditingkat satker untuk periode satu tahun yang disusun berpedoman pada rencana strategis Polres Tanjungpinang, rencana strategis Polda Kepri, rencana strategis Polri, dokumen perencanaan Kapolri tahun 2021 dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional serta pagu alokasi anggaran. Rencana Kerja Polres Tanjungpinang senantiasa mengacu pada Visi & Misi Polres Tanjungpinang.

Sementara itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Polres Tanjungpinang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian dalam mendukung pelaksanaan penyidikan yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Polri dan kepentingan lain yang terkait sebagaimana visi dan misi yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Tanjungpinang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polres Tanjungpinang berpedoman pada Rencana Kerja Polres Tanjungpinang tahun anggaran 2021. Untuk mewujudkan tugas pokok tersebut diperlukan dukungan anggaran yang cukup besar. Namun mengingat masih terbatasnya anggaran negara, maka selektifitas prioritas sasaran program dan anggaran Polres Tanjungpinang tahun 2021 diharapkan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

Dengan era reformasi yang sedang bergulir sampai dengan saat ini, Kepolisian Resor Tanjungpinang senantiasa terus berupaya mendukung dan mengawasi agar reformasi dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut Polres Tanjungpinang yang juga bagian dari instansi pemerintah telah melaksanakan reformasi di dalam pengelolaan organisasi baik dari aspek akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan Negara, dimana

ketentuan tersebut seperti yang telah tertuang dalam Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk pertanggung jawaban terkait pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata secara periodik. Pemerintah melalui Intruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut TAP MPR RI dan Undang Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau unit kerja di dalamnya, membuat laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Polri berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden, dan pasal ayat 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Berdasarkan amanat Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, maka secara organisasi dalam pelaksanaaan tugasnya Kapolres Tanjungpinang bertanggungjawab kepada Kapolda Kepri.

Tugas Pokok Polri (Polres Tanjungpinang) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Polres Tanjungpinang

Kepolisian Resor Tanjungpinang mengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas Polri lainnya di dalam hukum Polresta Barelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi…..

2. Fungsi Polres Tanjungpinang

Dalam rangka mengemban tugas tersebut diatas Polres Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi :

a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan fungsi Intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), termasuk persandian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres Tanjungpinang dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;

c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi, fungsi laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum, penerbitan SP2HP dalam rangka penegakan hukum dan transparansi dalam proses penyidikan, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

d. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);

e. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

f. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;

g) Pembinaan…..

g. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;

h. Pembinaan hubungan kerja sama yang meliputi kerja sama dengan organisas/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil;dan

i. Fungsi-fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

C. Struktur Organisasi Polres Tanjungpinang

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Struktur organisasi Polres Tanjungpinang terdiri dari:

Organisasi Kepolisian Resor Tanjungpinang disusun dalam 2 (dua) tingkat yaitu:

1. Tingkat Kepolisian Resor Tanjungpinang (Polres Tanjungpinang), dengan susunan organisasi sebagai berikut :

   Unsur Pimpinan :

   a. Kapolres Tanjungpinang;
   b. Wakapolres Tanjungpinang.

   Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan :

   a. Bagian Operasi (Bagops);
   b. Bagian Perencanaan (Bagren);
   c. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM);
   d. Bagian Logistik (Bag Log);
   e. Seksi Pengawasan (Siwas);
   f. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam);
   g. Seksi Keuangan (Sikeu);

h. Seksi Umum (Sium);

i. Seksi Hukum (Sikum);

j. Seksi Hubungan Masyarakat (Sihumas);

k. Seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian (Sidokes).

Unsur Pelaksana Utama:

a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);

b. Sat Intelkam;

c. Sat Reskrim;

d. Sat Resnarkoba;

e. Sat Binmas;

f. Sat Samapta;

g. Sat Lantas;

h. Sat Polair;

i. Sat Tahti.

Unsur Pendukung:

Seksi Teknologi Informasi Komunikasi (Si TIK)

2. Tingkat Kepolisian Sektor (Polsek dan unsur pelaksana tugas Kewilayahan) terdiri dari:

No	Kesatuan	Status	Awal	Posisi
1.	Polsek Kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura	Tipe B	1	1
2.	Polsek Bukit Bestari	Tipe B	1	1
3.	Polsek Tanjung Pinang Kota	Tipe C	1	1
4.	Polsek Tanjung PinangTimur	Tipe C	1	1
5.	Polsek Tanjung Pinang Barat	Tipe C	1	1
6.	Polsek Kawasan Bandara R.H.F	Tipe D	1	1

D. Permasalahan

1. Pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Tanjungpinang seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, regional, nasional dan daerah akan semakin berat dan komplek. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Kepolisian Resor Tanjungpinang dan pelayanan di bidang Kepolisian oleh Kepolisian Resor Tanjungpinang semakin tinggi mengharuskan Kepolisian Resor Tanjungpinang menyusun berbagai upaya dan aksi konkrit yang efektif dalam mewujudkan keamanan daerah. Secara umum permasalahan dibidang keamanan yang dihadapi Kepolisian Resor Tanjungpinang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

   a. Kualitas pelayanan publik Kepolisian Resor Tanjungpinang perlu ditingkatkan melalui pelaporan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi yang modern dan meniadakan pungutan liar kepada masyarakat;

   b. Perlunya optimalisasi profesionalisme sumber daya manusia Kepolisian Resor Tanjungpinang melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi;

   c. Penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, transnasional, kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi, antara lain : Narkoba, terorisme, korupsi, Siber dan tindak pidana lainnya yang menjadi perhatian publik untuk ditangani Kepolisian Resor Tanjungpinang secara proporsional dan efektif;

   d. Pengawasan perlu ditingkatkan untuk terlaksananya tugas pokok, fungsi dan peran Kepolisian Resor Tanjungpinang dengan baik serta terwujudnya pelayanan yang transparan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dengan mengefektifkan kegiatan pengawasan;

   e. Masih terdapatnya polsek yang berstatus Prarural, sehingga belum optimal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yaitu Polsek Bandara Raja Haji Fissabilillah;

   f. Belum tercukupinya kebutuhan perumahan dinas bagi anggota Kepolisian Resor Tanjungpinang;

   g. Belum tersedianya lahan/tanah sehingga menyulitkan untuk diusulkan pembangunan kantor/rumah dinas Polri dan fasilitasnya:

   h. Pengelolaan keamanan wilayah perairan perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan lintas batas;

   i. Perlunya peningkatan kerjasama dibidang keamanan dengan Pemerintah daerah dan stakeholder lainnya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Polres Tanjungpinang Tahun 2020-2024

Tahun 2020 merupakan pelaksanaan awal rencana kerja Polri dalam tahapan Renstra Polri tahun 2020-2024, sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional (RPJMN) menyatakan bahwa tema RPJMN 2020-2024 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yaitu “Indonesia yang berpenghasilan menengah - tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan“.

Pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bapenas telah menyusun Konsep Arah Kebijakan Nasional untuk tahun 2020-2024 bidang pertahanan dan keamanan yaitu : (1) meningkatkan pelayanan publik; (2) Penguatan SDM; (3) Pemantapan Manajemen Internal.

Dalam isu strategis RPJMN 2020-2024 dibidang pertahanan keamanan dengan sub isu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, ada tiga arah kebijakan yaitu satu peningkatan pelayanan publik, dengan sasaran antara lain meningkatkan pelaksanaan Quick Respons dan Quick Wins, (memperdayakan community Policing / Polmas), penanganan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dua penguatan SDM dengan sasaran antara lain, peningkatan Diklat Polri, dan tiga pemantapan manajemen internal dengan sasaran peningkatan sistem teknologi Informasi dan komunikasi Polri. Pembangunan Polri lima tahun kedepan bidang Politik Hukum dan Hankam yang difokuskan pada penciptaan prekondisi dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi upaya peningkatan daya saing dan pencapaian keberhasilan pembangunan dengan ditekankan upaya-upaya untuk memantapkan demokrasi, keadilan dan kepastian Hukum, penciptaan kondisi aman dan damai, terwujudnya birokrasi yang profesional dan terwujudnya regulasi yang berkualitas.

Tahun 2020 adalah merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Polres Tanjungpinang 2020-2024 yang merupakan tahap ke IV (Exellent) yang merupakan kelanjutan Renstra Polres Tanjungpinang 2015-2019 tahap III (Strive For Excellent), dimana tahun 2020 akan melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis Teknologi Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan Nasional.

Terwujudnya…..

Terwujudnya postur personel Polres Tanjungpinang sebagai sosok penolong, pelayan dan sahabat masyarakat serta penegak Hukum yang jujur, benar, adil, transparan dan akuntabel guna memelihara keamanan wilayah hukum Polresta Barelang yang mantap didukung sinergitas Polisional dalam rangka keberlangsungan pembangunan Prop. Kepri, Tanjungpinang khususnya melalui kemitraan dengan berbagai lapisan masyarakat..

Pada pelaksanaan Renstra III (2020-2024), pemerintahan jilid II Presiden Joko Widodo melalui Kabinet Kerja mengusung program pembangunan nasional yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. Mengundang invenstasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja;
4. Reformasi Birokrasi;
5. APBN yang focus dan tepat sasaran.

Selaras dengan keinginan Kabinet Kerja untuk membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemuliaan kepercayaan publik, maka Polri khususnya Polresta Barelang melakukan pembinaan mental dan displin terus menerus dengan mengadakan pembinaan rohani dan pelatihan untuk menghasilkan polisi yang berwatak sipil, tidak militeristik dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga serta memelihara kamtibmas.

Secara substantif Rencana Strategis Polresta Barelang memuat Visi dan Misi, tujuan yang ingin dicapai, sasaran prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Visi Polres Tanjungpinang

Terwujudnya Kota Tanjungpinang yang aman dan tertib.

2. Misi Polres Tanjungpinang

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.

3. Tujuan

a. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh daerah hukum Polres anjungpinang;

b. Menegakkan hukum secara berkeadilan;

c. Mewujudkan…..

c. Mewujudkan Polres Tanjungpinang yang Profesional;

d. Modernisasi pelayanan Polres Tanjungpinang;

e. Menerapkan manajemen Polres Tanjungpinang yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis Polres Tanjungpinang.

Sasaran strategis Polri dalam kurun waktu 5 (lima tahun) kedepan adalah membangun pelayanan prima yang mantap (Strive for excellen). Pencapaian sasaran strategi dimaksud dalam rangka melanjutkan strategi membangun kemitraan dan strategi membangun kepercayaan sehingga tercipta kondisi kamtibmas yang lebih kondusif. Dalam mewujudkan standar pelayanan kamtibmas yang prima tersebut, maka sasaran strategis Polres Tanjungpinang tahun 2020-2024 adalah:

a. Keamanan dan Ketertiban masyarakat Kota Tanjungpinang.
   - Indeks Keamanan dan Ketertiban masyarakat Kota Tanjungpinang.

b. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat didaerah hukum Polres Tanjungpinang.
   - Indeks Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

c. Penegakan hukum secara berkeadilan didaerah hukum Polres Tanjugpinang.
   - Indeks penegakan hukum Polres Tanjungpinang.

d. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Tanjungpinang.
   - Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Tanjungpinang.

e. Terbangunnya sarana dan prasarana Polres Tanjungpinang yang modern.
   1) Persentase pemenuhan Alat Komunikasi (Alkom);
   2) Persentase pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus);
   3) Persentase pemenuhan pembangunan Polres Tanjungpinang;
   4) Persentase pemenuhan ketersediaan Arsip Data Komputer (ADK) pada Alat Material Khusus (Almatsus) Polres Tanjungpinang.

f. Sistem…..

f. Sistem pengawasan yang Akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Polres Tanjungpinang;
2) Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) Polres Tanjungpinang;
3) Nilai Kinerja Anggaran Polres Tanjungpinang;
4) Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat;
5) Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polres Tanjungpinang.

B. Perjanjian Kinerja Polres Tanjungpinang

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dilingkungan Polri.Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja apatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment)

Polres Tanjungpinang telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2021, kegiatan yang disusun adalah kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satker Polres Tanjungpinang, Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Perjanjian Kinerja Polres Tanjungpinang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
IK IMPACT				
Stakeholder				
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Tanjungpinang	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Tanjungpinang	2,1

IK UTAMA				
Internal Process				
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di daerah hukum Polres Tanjungpinang	IKU1	Indeks Harkamtibmas	78
SS2	Penegakkan Hukum secara Berkeadilan di daerah hukum Polres Tanjungpinang	IKU2	Indeks Gakkum	91
IK PENUNJANG				
Innovation				
SS3	Profesionalisme SDM Polres Tanjungpinang	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polres Tanjungpinang	77
SS4	Terbangunnya Sarana prasarana Polres Tanjungpinang yang modern	IKP2	Persentase Pemenuhan Alkom	53%
		IKP3	Persentase Pemenuhan Almatsus	65%
		IKP4	Persentase pemenuhan pembangunan Polres Tanjungpinang	61%
		IKP5	Persentase Pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polres Tanjungpinang	100%
SS5	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih Terbuka dan Melayani	IKP6	Nilai AKIP	72,21
		IKP7	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) Polres Tanjungpinang	82,71
		IKP8	Nilai Kinerja Anggaran	90
		IKP9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	67,67%
		IKP10	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polres Tanjungpinang	86%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Tanjungpinang Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam uraian sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja pada Polres Tanjungpinang T.A. 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya masing-masing indikator kinerja sasaran, rincian tingkat capaian masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel Pengukuran Kinerja (PK) Polres Tanjungpinang Tahun 2021.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian masih ada beberapa sasaran strategis yang belum optimal diwujudkan di tahun 2021. Namun terhadap sasaran maupun target indikator yang belum berhasil diwujudkan, telah dilakukan beberapa analisa dan evaluasi sebagai bahan umpan balik (feedback) dalam rangka peningkatan capaian kinerja dimasa yang akan datang.

Tabel Pengukuran Kinerja

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
IK IMPACT						
Stakeholder						
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Tanjungpinang	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Tanjungpinang	2,1	3,1	148
IK UTAMA						
Internal Process						
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di daerah hukum Polres Tanjungpinang	IKU1	Indeks Harkamtibmas	78	67,09	86,01
SS2	Penegakkan Hukum secara Berkeadilan di daerah hukum Polres Tanjungpinang	IKU2	Indeks Gakkum	91	56,15	61,70

IK PENUNJANG						
Innovation						
SS3	Profesionalisme SDM Polres Tanjungpinang	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polres Tanjungpinang	77	68	88
SS4	Terbangunnya Sarana prasarana Polres Tanjungpinang yang modern	IKP2	Persentase Pemenuhan Alkom	53%	0	0
		IKP3	Persentase Pemenuhan Almatsus	65%	0	0
		IKP4	Persentase pemenuhan pembangunan Polres Tanjungpinang	61%	0%	0
		IKP5	Persentase Pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polres Tanjungpinang	100%	63%	63%
SS5	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih Terbuka dan Melayani	IKP6	Nilai AKIP	72,21	64,99	90%
		IKP7	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) Polres Tanjungpinang	82,71	90	109%
		IKP8	Nilai Kinerja Anggaran	90	90	100
		IKP9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	67,67%	0	0
		IKP10	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polres Tanjungpinang	86%	0	0

B. Indikator Capaian Indikator Kinerja

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran, perbandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, hamabatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil diantaranya:

1. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Tanjungpinang.

Tabel 1

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Tanjungpinang	2,1	3,1	148%

Analisa:

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Tanjungpinang pada indikator kinerja Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Tanjungpinang target 2,1 (Kinerja level II) terealisasi sebesar 3,1 (Kinerja level III) sehingga capaian kinerja sebesar 148%, hal tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan oleh Polres Tanjungpinang pada dokumen Perjanjian Kinerja T.A. 2021 dan akan dipertahankan kinerjanya sesuai dengan harapan masyarakat Kota Tanjungpinang.

Tabel 2

Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Tanjungpinang

No	Data	Indeks Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Indek Harkamtibmas**	**68,8**	**67,09**				
	a. Road Safty Indeks	1,0	2,6				
	b. Indeks Community Policing	2,9	6,5				
	c. Responsetime kehadiran Polisi di TKP	2,7	5,0				
	d. Tingkat keamanan dijalur perairan Kota Tanjungpinang	4,6	1,0				
	e. Pemenuhan Pam Obvit	5,0	1,8				

f. Crime rate.....

	f. Crime rate	1,0	4,6				
2	**Indeks Penegakan Hukum**	**2,81**	**56,15**				
	a. Clearance rate kejahatan konvensional	4,3	5,0				
	b. Clearance rate kejahatan transnasional	0	4,6				
	c. Clearance rate kejahatan kekayaan Negara	0	1,0				
	d. Clearance rate kejahatan kontijensi	0	1,0				
	e. Penyelesaian Laka Lantas	4,8	2,8				
	f. Penyelesaian Tindak Pidana Perairan	0	1,0				

Grafik Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Tanjungpinang

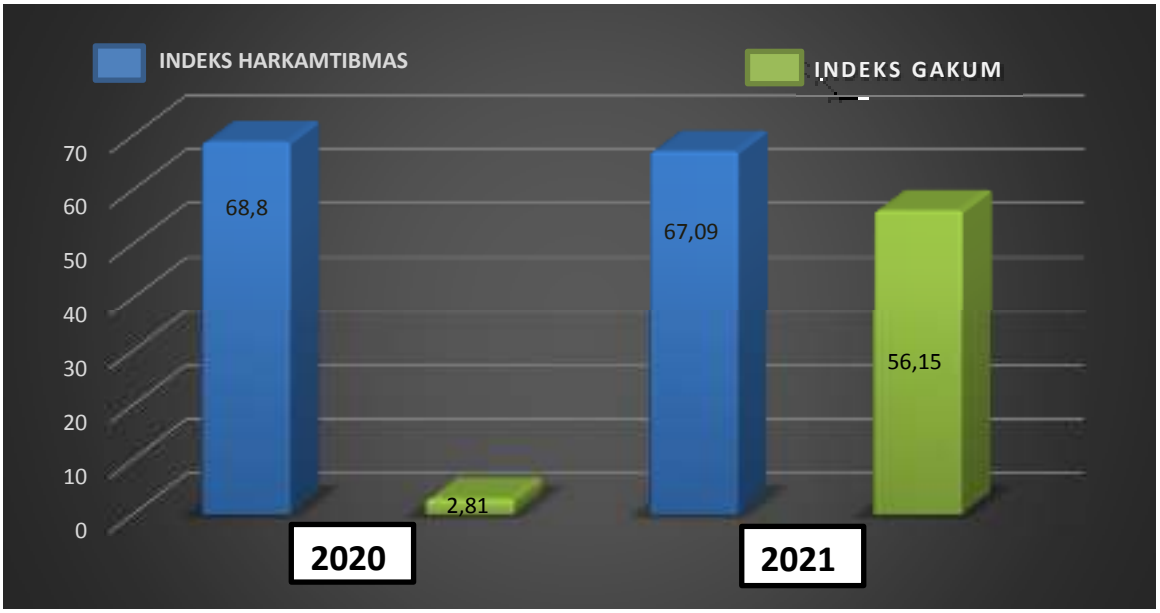

2. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di daerah hukum Polres Tanjungpinang.

Tabel 3

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
IKU1	Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.	78	67,09	86,01%

Analisa:

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di daerah hukum Polres Tanjungpinang pada indikator kinerja Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat target 78 (Kinerja level III) terealisasi sebesar 67,09 (Kinerja level III) sehingga capaian kinerja sebesar 86,01%, hal tersebut tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2021 capaian Polres Tanjungpinang pada komponen pengungkit indeks Harkamtibmas menunjukan indikator sebagai berikut:

a. Komponen Road Safty Indeks Polres Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka 2,6 yang artinya pada posisi kinerja adalah perlu pembenahan.
b. Komponen Indeks Community Policing Polres Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka 6,5 yang artinya pada posisi kinerja adalah istimewa.
c. Komponen Responsetime kehadiran Polisi di TKP Polres Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka 5,0 yang artinya pada posisi kinerja adalah istimewa.
d. Komponen Tingkat keamanan dijalur perairan Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka 1,0 yang artinya pada posisi kinerja adalah perlu pembenahan.
e. Komponen Pemenuhan Pam Obvit Polresta Barelang pada tahun 2021 diperoleh angka 1,8 yang artinya pada posisi kinerja adalah perlu pembenahan.
f. Komponen Crime rate Polres Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka 4,6 yang artinya pada posisi kinerja adalah istimewa.

Tabel 4…..

Tabel 4

Data Indeks Harkamtibmas

No	Data	Indeks Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Indek Harkamtibmas**	**68,8**	**67,09**				
	a. Road Safty Indeks	1,0	2,6				
	b. Indeks Community Policing	2,9	6,5				
	c. Responsetime kehadiran Polisi di TKP	2,7	5,0				
	d. Tingkat keamanan dijalur perairan Kota Tanjungpinang	4,6	1,0				
	e. Pemenuhan Pam Obvit	5,0	1,8				
	f. Crime rate	1,0	4,6				

Grafik Indeks Harkamtibmas

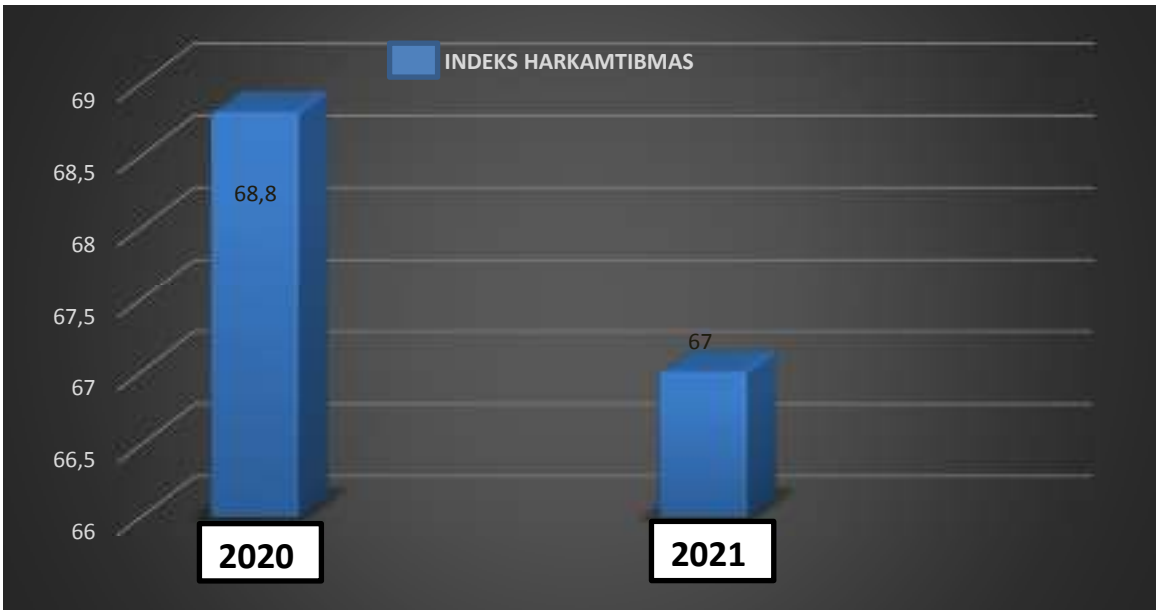

3. Penegakkan Hukum secara Berkeadilan di daerah hukum Polres Tanjungpinang.

Tabel 5

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
IKU2	Indeks Penegakan Hukum Polres Tanjungpinang	91	56,15	61,70%

Analisa:

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis Penegakkan Hukum secara Berkeadilan di daerah hukum Polres Tanjungpinang pada indikator kinerja Indeks Penegakan Hukum Polres Tanjungpinang target 91 (Kinerja level III) terealisasi sebesar 56,15 (Kinerja level II) sehingga capaian kinerja sebesar 61,70%, penegakan hukum di Polres Tanjungpinang belum tercapai dengan baik di tahun 2021, capaian Polres Tanjungpinang pada komponen pengungkit indeks penegakan hukum menunjukan indikator sebagai berikut:

a. Komponen Clearance rate kejahatan konvensional Polres Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka 5,0 yang artinya pada posisi kinerja adalah baik.
b. Komponen Clearance rate kejahatan transnasional Polres Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka 4,6 yang artinya pada posisi kinerja adalah baik.
c. Komponen Clearance rate kejahatan kekayaan Negara Polres Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka 1,0 yang artinya pada posisi kinerja adalah perlu pembenahan
d. Komponen Clearance rate kejahatan kontijensi Polres Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka 1,0 yang artinya pada posisi kinerja adalah perlu pembenahan.
e. Komponen Penyelesaian Laka Lantas Polresta Barelang pada tahun 2021 diperoleh angka 2,8 yang artinya pada posisi kinerja adalah perlu pembenahan.
f. Komponen Penyelesaian Tindak Pidana Perairan Polres Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka 1,0 yang artinya pada posisi kinerja adalah perlu pembenahan.

Tabel 6…..

Tabel 6

Data Indeks Gakkum

No	Data	Indeks Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Indeks Penegakan Hukum**	**2,81**	**56,15**				
	a. Clearance rate kejahatan konvensional	4,3	5,0				
	b. Clearance rate kejahatan transnasional	0	4,6				
	c. Clearance rate kejahatan kekayaan Negara	0	1,0				
	d. Clearance rate kejahatan kontijensi	0	1,0				
	e. Penyelesaian Laka Lantas	4,8	2,8				
	f. Penyelesaian Tindak Pidana Perairan	0	1,0				

Grafik Indeks Gakkum

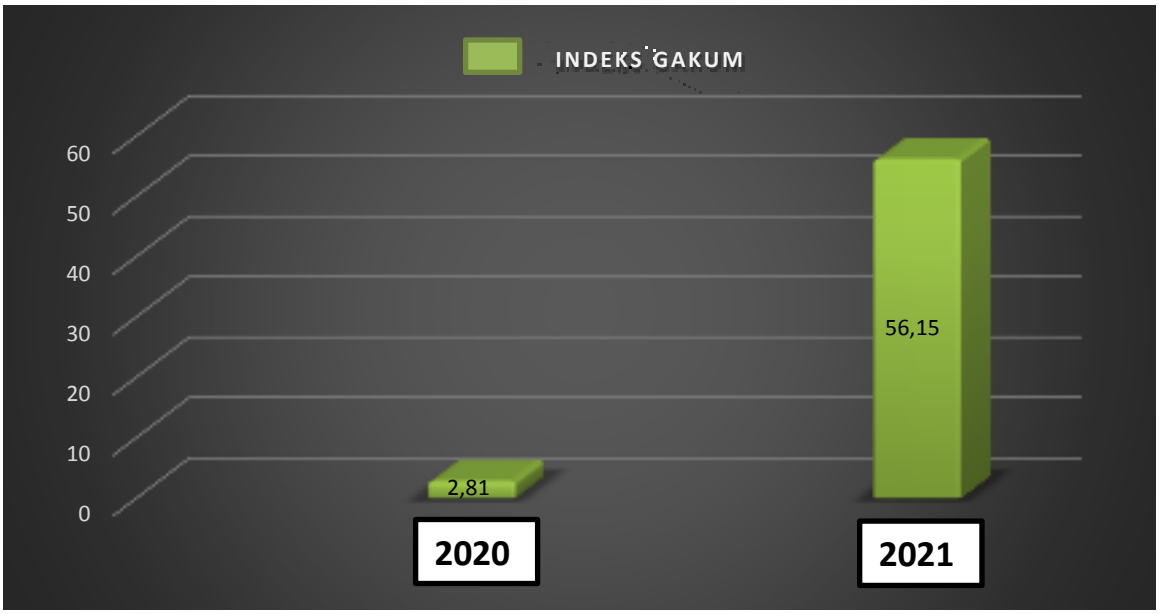

4. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Tanjungpinang

Tabel 7

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
IKP1	Indeks Profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Tanjungpinang	77	68	88%

Analisa:

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Tanjungpinang pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Tanjungpinang target 77 (Kinerja skala III) terealisasi sebesar 68 (Kinerja skala III) sehingga capaian kinerja sebesar 88%, hal tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Polres Tanjungpinang pada dokumen Perjanjian Kinerja T.A. 2021 yaitu kinerja pada skala III (memadai) dan terus akan ditingkatkan kinerjanya sesuai dengan kemajuan teknologi dan tantangan tugas kedepan, capaian Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Tanjungpinang pada komponen pengungkit indeks profesionalitas SDM menunjukan indikator sebagai berikut:

a. Komponen Rekrutmen BETAH/jumlah penambahan personel Polres Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka 11% yang artinya pada posisi kinerja adalah skala 2 (memadai).
b. Komponen Kompetensi Polres Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka -62,50% yang artinya pada posisi kinerja adalah skala 1 (perlu pembenahan).
c. Komponen Kinerja Polres Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka pada pegawai Polri sebesar 82,34 yang artinya pada posisi kinerja adalah skala 4 (baik), dan PNS sebesar 85,80 yang artinya pada posisi kinerja adalah skala 4 (baik).
d. Komponen Reward Polres Tanjungpinang pada tahun 2021 diperoleh angka 2% yang artinya pada posisi kinerja adalah skala 1 (perlu pembenahan).

Tabel 8…..

Tabel 8

Data Indeks Profesionalisme SDM

No	Data	Indeks Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Indeks Profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Tanjungpinang**	**65**	**68**				
	a. Persentase Rekrutmen BETAH/jumlah penambahan personel	52%	11%				
	b. Persentase Kompetensi Polres Tanjungpinang	87,50%	- 65,50%				
	c. Kinerja Polres Tanjungpinang						
	- Polri	80	82,34				
	- PNS	85	85,80				
	d. Persentase pemberian Reward	0	2%				

Grafik Indeks Profesionalisme SDM

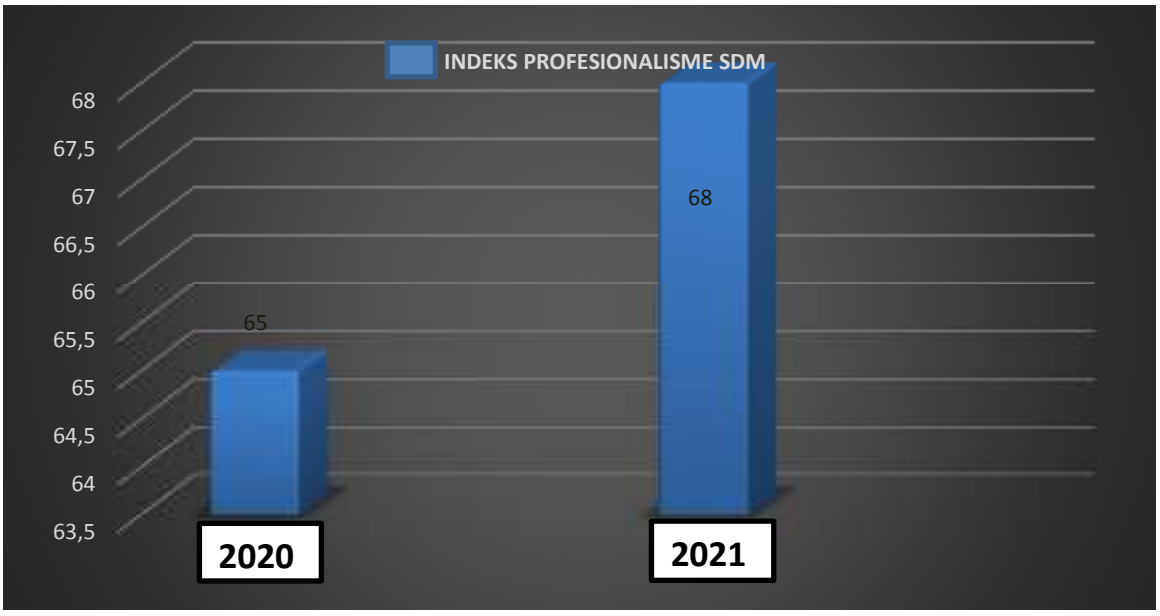

5. Terbangunnya…..

5. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Polres Tanjungpinang yang Modern.

a. Persentase Pemenuhan Alat Komunikasi

Tabel 9

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
IKP2	Persentase Pemenuhan Alat Komunikasi	53%	0%	0%

Analisa:

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis Terbangunnya Sarana dan Prasarana Polres Tanjungpinang yang Modern pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Alat Komunikasi target 53% terealisasi sebesar 0% sehingga capaian kinerja sebesar 0%, hal tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Polres Tanjungpinang pada dokumen Perjanjian Kinerja T.A. 2021 yaitu pengusulan Alkom Polres Tanjungpinang sebanyak 1 Alkom dan terpenuhi sebanyak 1 Alkom.

Tabel 10

Data Pemenuhan Alkom

No	Data	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Data pemenuhan Alkom**						
	a. Jumlah permintaan/ usulan Alkom	130	0				
	b. Jumlah terealisasi Alkom	40	0				

Grafik Pemenuhan Alkom

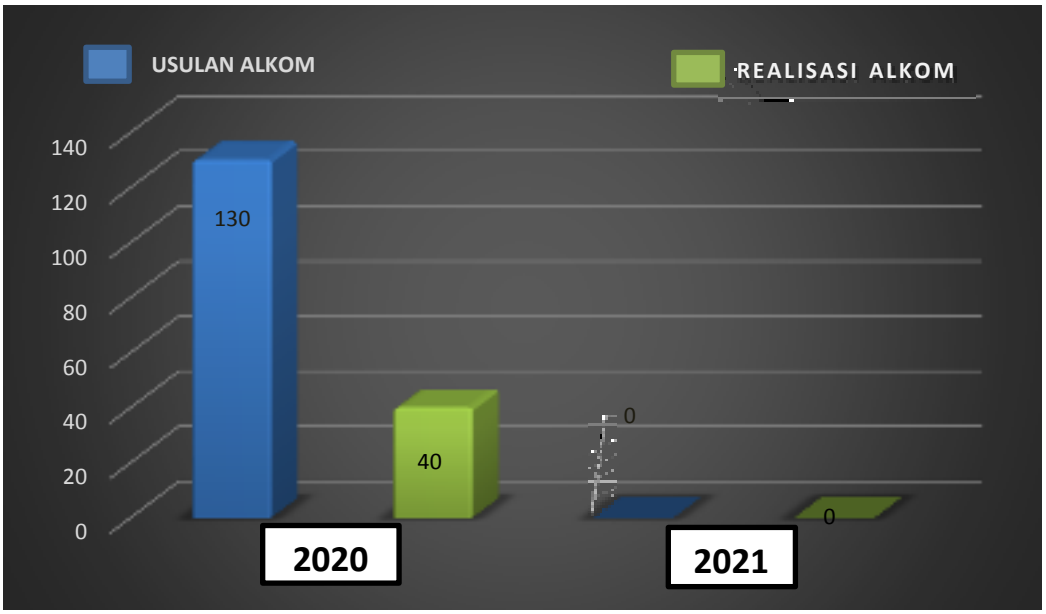

b. Persentase Pemenuhan Alat Material Khusus

Tabel 11

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
IKP3	Persentase Pemenuhan Alat Material Khusus	65%	67%	106,35%

Analisa:

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis Terbangunnya Sarana dan Prasarana Polres Tanjungpinang yang Modern pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Alat material Khusus target 65% terealisasi sebesar 0% sehingga capaian kinerja sebesar 0%, hal tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Polres Tanjungpinang pada dokumen Perjanjian Kinerja T.A. 2021 yaitu pengusulan Almatsus Polres Tanjungpinang sebanyak 0 Alat dan terpenuhi sebanyak 30 Alat.

Tabel 12…..

Tabel 12

Data Pemenuhan Almatsus

No	Data	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Data pemenuhan Almatsus**						
	a. Jumlah permintaan/ usulan Almatsus	5	0				
	b. Jumlah terealisasi Almatsus	5	30				

Grafik Pemenuhan Almatsus

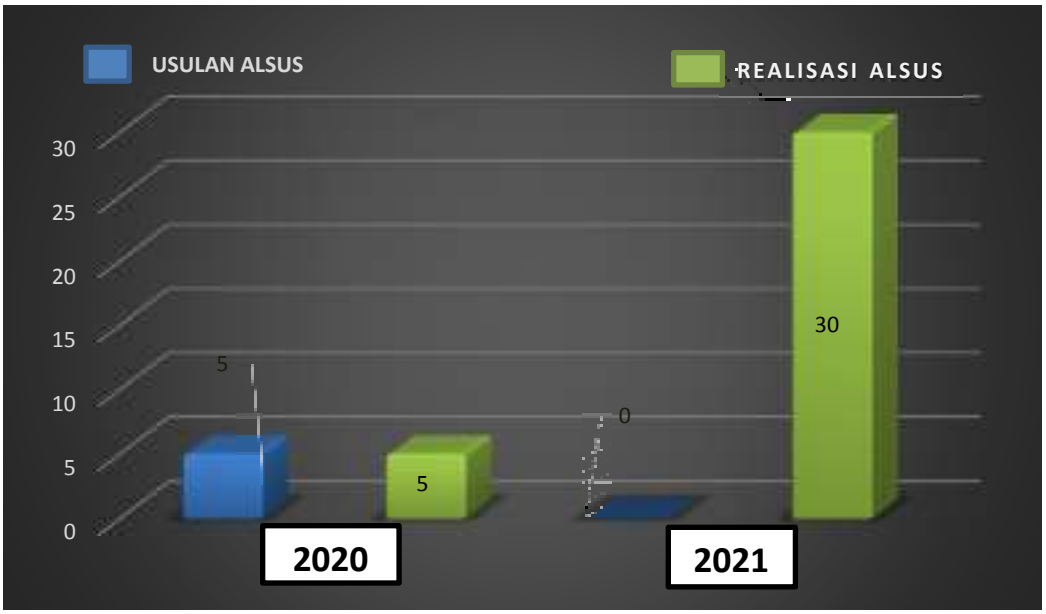

c. Persentase…..

c. Persentase Pemenuhan Pembangunan Polres Tanjungpinang

Tabel 13

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
IKP4	Persentase Pemenuhan Pembangunan Polres Tanjungpinang	61%	0%	0%

Analisa:

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis Terbangunnya Sarana dan Prasarana Polres Tanjungpinang yang Modern pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Pembangunan Polres Tanjungpinang target 61% terealisasi sebesar 0% sehingga capaian kinerja sebesar 0%, hal tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Polres Tanjungpinang pada dokumen Perjanjian Kinerja T.A. 2021 yaitu pengusulan Pembangunan Polres Tanjungpinang sebanyak 0 Unit dan terpenuhi sebanyak 0 Unit.

Tabel 14

Data Pemenuhan Pembangunan

No	Data	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Data pemenuhan Pembangunan Polres Tanjungpinang**	0	0				
	a. Jumlah permintaan/ usulan pembangunan	0	0				
	b. Jumlah terealisasi pembangunan						

Grafik…..

Grafik Pemenuhan Pembangunan

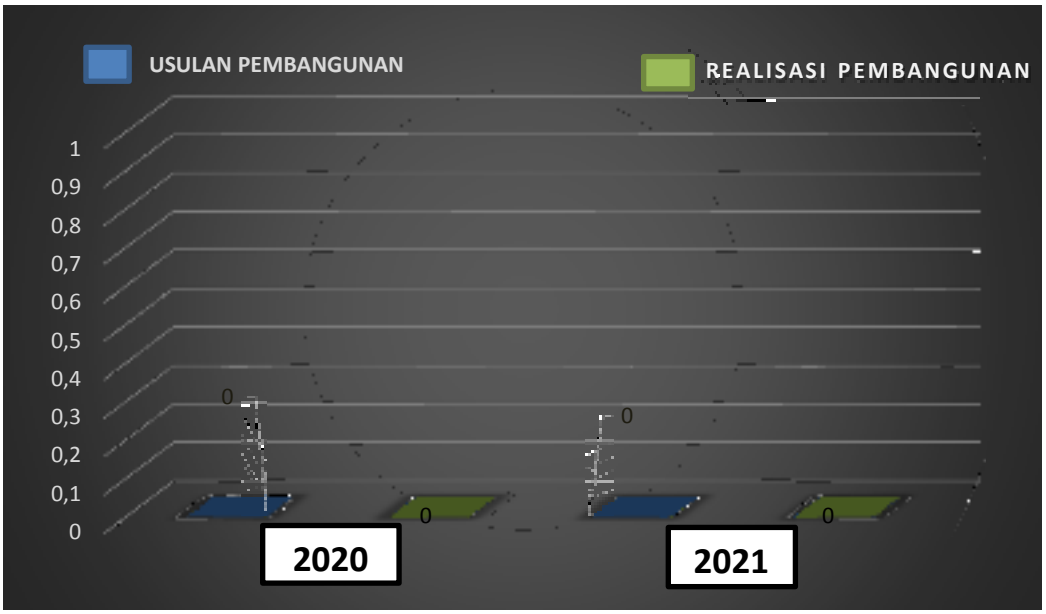

d. Persentase Pemenuhan Ketersediaan Arsip Data Komputer (ADK) pada Almatsus Polres Tanjungpinang

Tabel 15

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
IKP5	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Arsip Data Komputer (ADK) pada Almatsus Polres Tanjungpinang	100%	63%	63%

Analisa:

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis Terbangunnya Sarana dan Prasarana Polres Tanjungpinang yang Modern pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Ketersediaan Arsip Data Komputer (ADK) pada Almatsus Polres Tanjungpinang target 100% terealisasi sebesar 63% sehingga capaian kinerja sebesar 63%, hal tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan oleh Polres Tanjungpinang pada dokumen Perjanjian Kinerja T.A. 2021 yaitu jumlah data Almatsus Polres Tanjungpinang sebanyak 19 Unit dan yang sudah memiliki Arsip Data Komputer (ADK) sebanyak 30 Unit.

Tabel 16…..

Tabel 16

Data Pemenuhan ADK Almatsus

No	Data	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Data pemenuhan ADK Almatsus**						
	a. Jumlah Almatsus	18	19				
	b. Jumlah Almatsus yang sudah memiliki ADK	25	30				

Grafik Pemenuhan ADK Almatsus

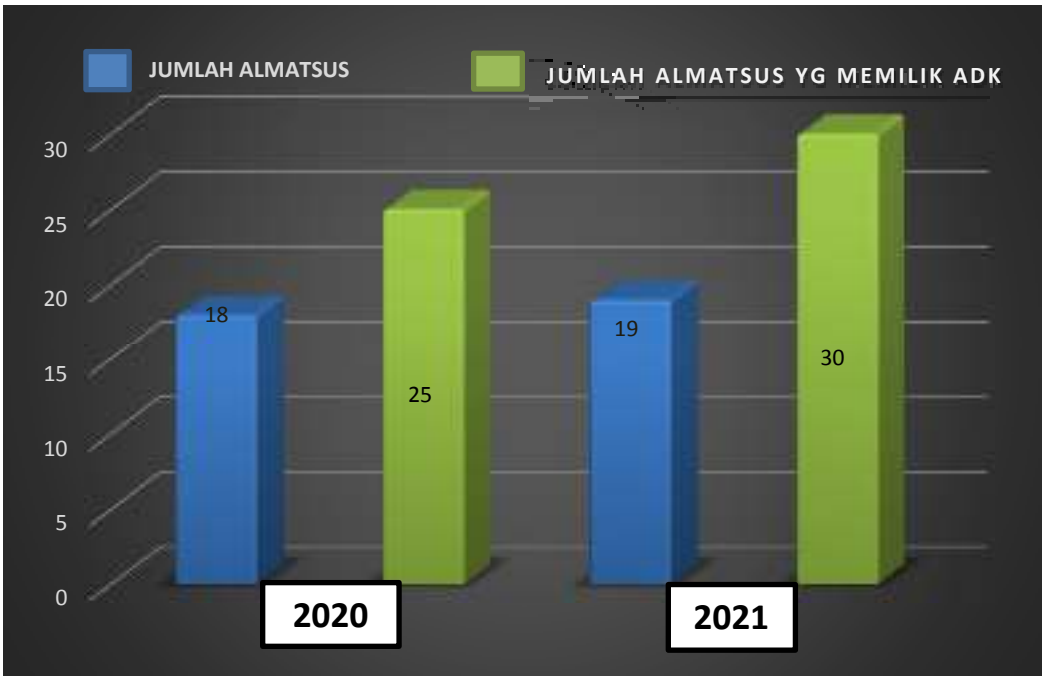

6. Sistem Pengawasan yang Akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Polres Tanjungpinang

Tabel 17

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
IKP6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Polres Tanjungpinang	72,21	64,99	90%

Analisa:

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis Sistem Pengawasan yang Akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani pada indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Polres Tanjungpinang target 72,21 terealisasi sebesar 64,99 sehingga capaian kinerja sebesar 90%, hal tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan oleh Polres Tanjungpinang pada dokumen Perjanjian Kinerja T.A. 2021.

Tabel 18

Data Nilai AKIP Polresta Barelang

No	Data	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai AKIP Polres Tanjungpinang	71,62	72,21				

Grafik Nilai AKIP Polres Tanjungpinang

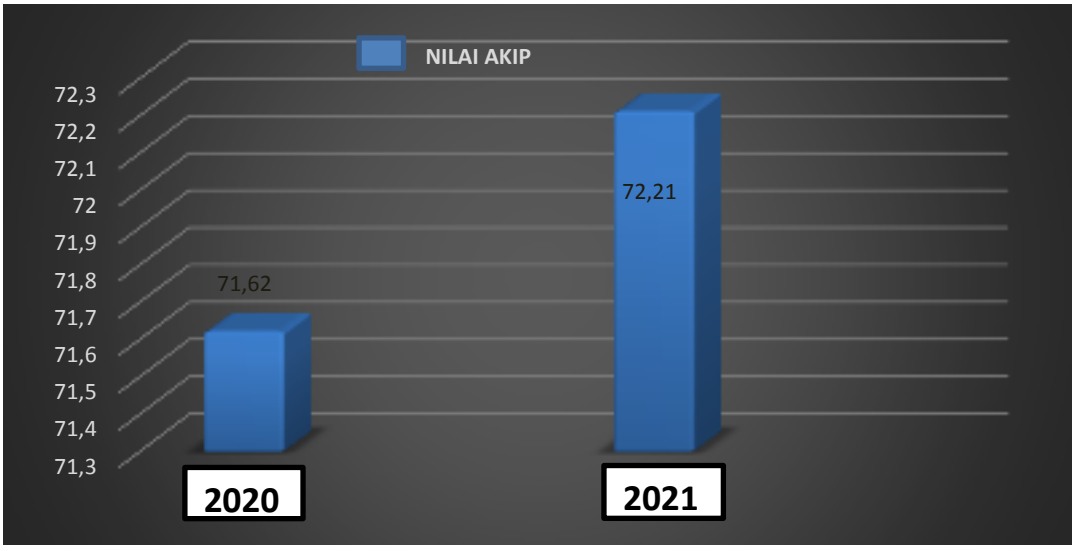

b. Indeks…..

b. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) Polres Tanjungpinang

Tabel 19

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
IKP7	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) Polres Tanjungpinang	82,71	90	109%

Analisa:

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis Sistem Pengawasan yang Akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) Polres Tanjungpinang target 82,71 terealisasi sebesar 90 sehingga capaian kinerja sebesar 109%, hal tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan oleh Polres Tanjungpinang pada dokumen Perjanjian Kinerja T.A. 2021 dengan mutu kualitas pelayanan **''Baik''**.

Tabel 20

Data nilai hasil survey layanan Polres Tanjungpinang

No	Data	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Jumlah Layanan**	**4**	**1**				
2	**Total Nilai Survey**	**294**					
	a. Nilai hasil survey layanan Sat Lantas (SIM)	25	90				
	b. Nilai hasil survey layanan Sat Intelkam (SKCK)	84	87				
	c. Nilai hasil survey layanan SPKT	95	85				
	d. Nilai hasil survey layanan Dokkes	90	80				

Grafik…..

Grafik nilai hasil survey layanan Polres Tanjungpinang

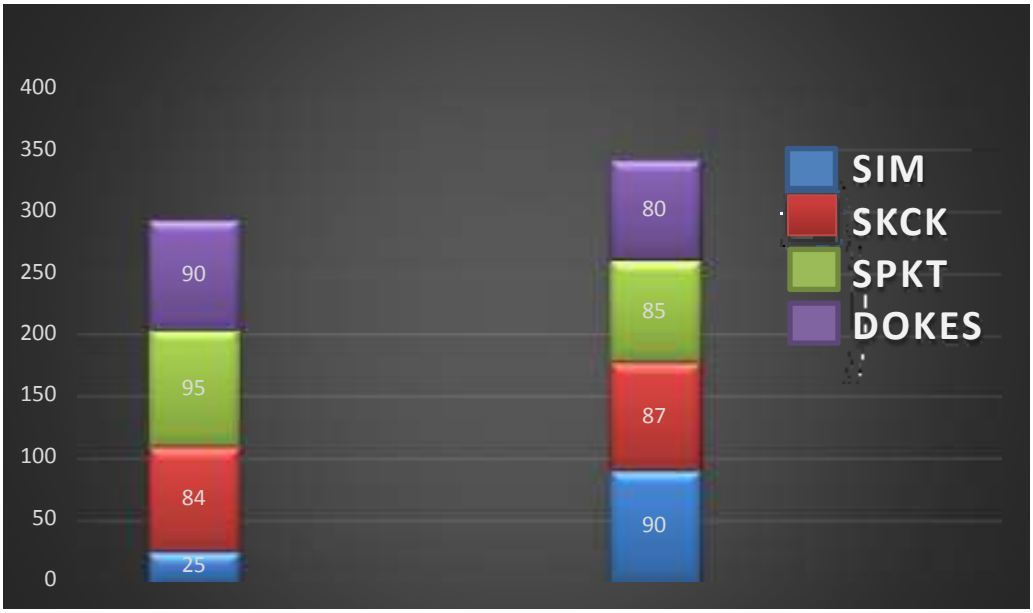

c. Nilai Kinerja Anggaran Polres Tanjungpinang

Tabel 21

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
IKP8	Nilai Kinerja Anggaran Polres Tanjungpinang	90	90	100%

Analisa:

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis Sistem Pengawasan yang Akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani pada indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Polres Tanjungpinang target 90 terealisasi sebesar 90 sehingga capaian kinerja sebesar 100%, hal tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan oleh Polres Tanjungpinang pada dokumen Perjanjian Kinerja T.A. 2021.

Tabel 22…..

Tabel 22

Data Nilai Kinerja Anggaran Polres Tanjungpinang

No	Data	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Kinerja Anggaran Polres Tanjungpinang	80,21	90				

Grafik Nilai Kinerja Anggaran Polres Tanjungpinang

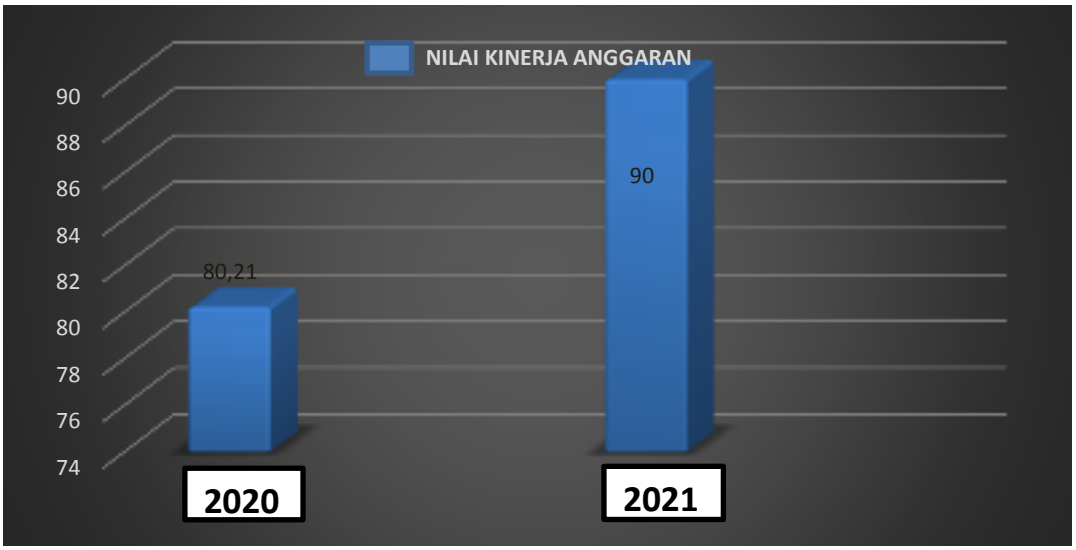

d. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tabel 23

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
IKP9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	67,67%	16,67%	24,63%

Analisa:

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis Sistem Pengawasan yang Akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani pada indikator kinerja Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat target 67,67% terealisasi sebesar 16,67% sehingga capaian kinerja sebesar 24,63%, hal tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Polres Tanjungpinang pada dokumen Perjanjian Kinerja T.A. 2021, jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2021 sebanyak 2 Aduan dan yang terselesaikan sebanyak 2 Aduan.

Tabel 24…..

Tabel 24

Data Dumas

No	Data	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Jumlah Dumas**	**23**	**2**				
	a. Dumas pada Reskrim	3	2				
	b. Dumas pada Resnarkoba	5	0				
	c. Dumas pada Polair	5	0				
	d. Dumas pada Siwas	5	0				
	e. Dumas pada Propam	5	0				
2	**Jumlah Dumas yang selesai**	**23**	**2**				
	a. Dumas pada Reskrim	3	2				
	b. Dumas pada Resnarkoba	5	0				
	c. Dumas pada Polair	5	0				
	d. Dumas pada Siwas	5	0				
	e. Dumas pada Propam	5	0				

Grafik Dumas

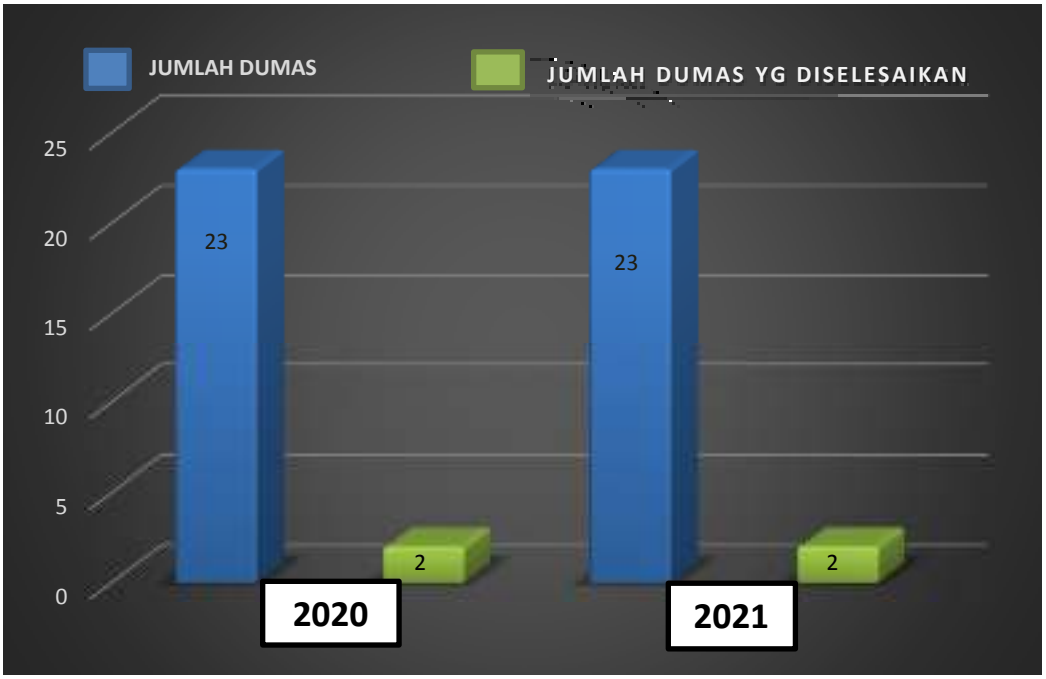

e. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polres Tanjungpinang

Tabel 25

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
IKP10	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polres Tanjungpinang	86%	0%	0%

Analisa:

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis Sistem Pengawasan yang Akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani pada indikator kinerja Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polres Tanjungpinang target 86% terealisasi sebesar 0% sehingga capaian

kinerja…..

kinerja sebesar 0%, hal tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Polres Tanjungpinang pada dokumen Perjanjian Kinerja T.A. 2021.

Tabel 26

Data Permasalahan Hukum Polres Tanjungpinang

No	Data	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah permasalahan hukum	0	0				
2	Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan	0	0				

Grafik Permasalahan Hukum Polres Tanjungpinang

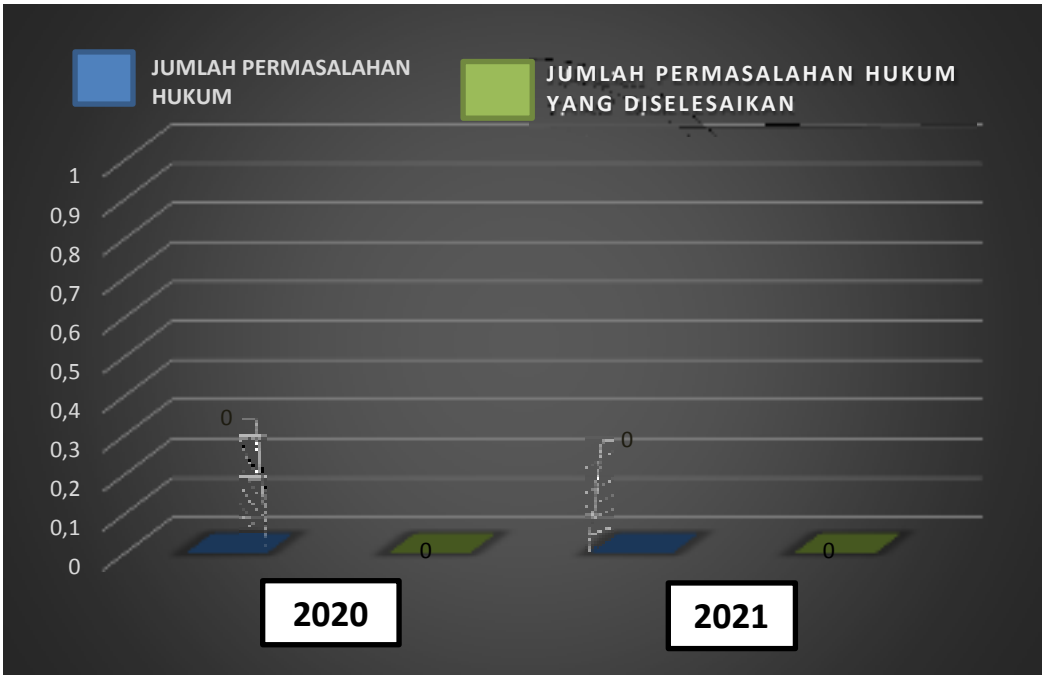

C. Realisasi Anggaran

1. Selama periode berjalan T.A. 2021, Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 8 (Tujuh) kali dan penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagai berikut:

   a. Data Awal dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.640981/2021 tanggal 23 November 2020;
   b. Revisi Ke-1 dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.640981/2021 tanggal 19 Februari 2021 (Revisi Kanwil DJPB);
   c. Revisi Ke-2 dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.640981/2021 tanggal 06 Juli 2021 (Revisi Kanwil DJPB);
   d. Revisi Ke-3 dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.640981/2021 tanggal 27 Juli 2021 (Revisi Kanwil DJPB);
   e. Revisi Ke-4 dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.640981/2021 tanggal 12 Oktober 2021 (Revisi Kanwil DJPB);
   f. Revisi Ke-5 dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.640981/2021 tanggal 24 November 2021 (Revisi Kanwil DJPB);
   g. Revisi Ke-6 dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.640981/2021 tanggal 01 Desember 2021 (Revisi Kanwil DJPB);
   h. Revisi Ke-7 dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.640981/2021 tanggal 13 Desember 2021 (Revisi DJA);
   k. Revisi Ke-8 dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.640981/2021 tanggal 31 Desember 2021 (Revisi DJA);

2. ALOKASI…..

2. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2021

a. Alokasi Anggaran Tahun 2021 Per Program

NO	PROGRAM	PAGU AWAL T.A. 2021	PAGU REVISI T.A. 2021	NAIK / TURUN	% NAIK / TURUN	
1	2	3	4	5	6	7
1	LIDIK SIDIK TP	3.433.225.000,-	2.665.198.000,-	-768.027.000,-	T	22
2	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARPRAS POLRI	12.915.180.000,-	10.106.897.000,-	-2.808.283.000,-	T	22
3	HARKAMTIBMAS	6.322.228.000,-	7.269.762.000,-	947.534.000,-	N	15
4	DUKMAN	39.461879.000,-	38.835.530.000,-	-5.666.235.000,-	T	2
JUMLAH		**62.132.512.000,-**	**58.877.387.000,-**	**-3.255.125.000,-**	**T**	**5**

(Sumber Dipa RKA-KL T.A. 2021)

b. Alokasi Anggaran Tahun 2021 Per Sumber Dana

NO	SUMBER DANA	PAGU AWAL T.A. 2021	PAGU REVISI T.A. 2021	NAIK / TURUN	% NAIK / TURUN	
1	2	3	4	5	6	7
1	RM	58.747.928.000,-	54.452.483.000.,-	-4.332.733.000,-	T	7
2	PNBP	3.384.584.000,-	3.424.904.000,-	-15.956.000,-	T	0
3	HIBAH DALAM NEGERI	0,-	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	N	100
JUMLAH		**62.132.512.000,-**	**58.877.387.000,-**	**-3.255.125.000,-**	**T**	**5**

(Sumber Dipa RKA-KL T.A. 2021)

c. Alokasi Anggaran Tahun 2021 Per Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL T.A. 2021	PAGU REVISI T.A. 2021	NAIK / TURUN	% NAIK / TURUN	
1	2	3	4	5	6	7
1	BELANJA PEGAWAI	38.802.377.000,-	38.219.411.000,-	-582.966.000,-	T	2
2	BELANJA BARANG	21.781.400.000,-	20.657.976.000,-	-1.123.424.000,-	T	5
3	BELANJA MODAL	1.548.735.000,-	0,-	1.548.735.000,-	-	0
JUMLAH		**62.132.512.000,-**	**58.877.387.000,-**	**-3.255.125.000,-**	**T**	**5**

(Sumber Dipa RKA-KL T.A. 2021)

3. REALISASI…..

3. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

a. Realisasi Anggaran T.A. 2021 Per Program

NO	PROGRAM	PAGU 2021	REALISASI	%	SISA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	LIDIK SIDIK TP	2.665.198.000,-	2.629.179.600,-	98,65	36.018.400,-	
2	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARPRAS POLRI	10.106.897.000,-	9.932.446.628,-	98,27	174.450.372,-	
3	HARKAMTIBMAS	7.269.762.000,-	7.233.180.809,-	99,50	36.581.191,-	
4	DUKMAN	38.835.530.000,-	38.805.277.474,-	99,92	30.252.526,-	
JUMLAH		**58.877.387.000,-**	**58.600.084.511,-**	**99,53**	**277.302.489,-**	

(Sumber Aplikasi OMSPAN T.A. 2021)

b. Realisasi Anggaran T.A. 2021 Per Sumber Dana

NO	SUMBER DANA	PAGU 2021	REALISASI	%	SISA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	RM	54.452.483.000,-	54.204.420.391,-	99,90	248.062.609,-	
2	PNBP	3.424.904.000,-	3.395.664.120,-	99,15	29.239.880,-	
3	HIBAH DALAM NEGERI	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	100	0,-	
JUMLAH		**58.877.387.000,-**	**58.600.084.511,-**	**99,53**	**227.302.489,-**	

(Sumber Aplikasi OMSPAN T.A. 2021)

c. Realisasi Anggaran T.A. 2021 Per Jenis Belanja

NO	Jenis Belanja	PAGU 2021	REALISASI	%	SISA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	38.219.411.000,-	38.198.562.919,-	99,97	20.848.081,-	
2	Belanja Barang	20.657.976.000,-	20.401.521.592,-	99,29	256.454.408,-	
3	Belanja Modal	0,-	0,-	0	0,-	
JUMLAH		**58.877.387.000,-**	**58.600.084.511,-**	**99,53**	**227.302.489,-**	

(Sumber Aplikasi OMSPAN T.A. 2021)

Sesuai…..

Sesuai dengan DIPA Polres Tanjungpinang T.A. 2021 anggaran yang telah dilaksanakan pada masing-masing program dan realisasinya adalah sebagai berikut:

1. Analisa dan Evaluasi realisasi anggaran per program sebagai berikut:

   a. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (LIDIK SIDIK).

      Total anggaran untuk program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah sebesar Rp.2.665.198.000,- terealisasi sebesar Rp.2.629.179.600,- (98,65%), sisa anggaran sebesar Rp.36.018.400,- hal ini disebabkan adanya sisa pada kegiatan Tindak Pidana Umum dan Cyiber Crime.

   b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri (SARPRAS).

      Total anggaran untuk program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri adalah sebesar Rp.10.106.897.000,- terealisasi sebesar Rp.9.932.446.628,- (98,27%), sisa anggaran sebesar Rp.174.450.372,- hal ini disebabkan adanya sisa pada kegiatan:

      1) Pemeliharaan kendaraan khusus Polres sebesar Rp.88.550,-;
      2) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4/6/10 Polres Rp.689.000,-;
      3) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4/6/10 Polsek Rp.20.502.000,-;
      4) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 Polres Rp.354,-;
      5) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 Polsek Rp. 2.195,-;
      6) Pemeliharaan gedung Rp. 6.500,-;
      7) Biaya listrik Rp.152.808.773,-;
      6) Pengadaan BMP Rp. 29.000,-;
      7) BMP fungsi Pol Air Rp. 66.000,-;
      8) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 Polres (PNBP) Rp. 141.600,-;
      9) Pengadaan BMP (PNBP) Rp. 19.000,-;
      10) BMP fungsi Lantas (PNBP) Rp. 45.000,-;

   c. Program Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (HARKAMTIBMAS).

      Total anggaran untuk program pemeliharaan kamtibmas adalah sebesar Rp.7.269.762.000,- terealisasi sebesar Rp.7.233.180.809,- (99,50%), sisa anggaran sebesar Rp.36.581.191,- hal ini disebabkan adanya sisa pada kegiatan:

      1) Pembinaan Intelijen Rp.1.615,-;
      2) Pembentukan jaringan intelijen Polres (3114) Rp. 150,-.
      3) Pembentukan jaringan intelijen Polres (3115) Rp. 150,-
      4) Pembentukan jaringan intelijen Polres (3116) Rp. 850,-
      5) Pembentukan jaringan intelijen Polres (3117) Rp. 850,-
      6) Dukungan Operasional Satker Rp. 13.600,-

7) Dukopsnal Polres Rp. 4.381.032,-
8) ULP non Organik Polres Rp. 8.000,-
9) Pembinaan Keamanan (PNBP) Rp.300,-
10) Pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan Polres Rp. 3.132.000,-
11) Menyelenggarakan turwali Polsek (PNBP) Rp. 420,-
12) Menyelenggarakan turwali Polres (PNBP) Rp. 50,-
13) Honor PNBP Rp. 6.886.000
14) Menyelenggarakan turwali Lantas (PNBP) Rp. 689.000,-
15) Menyelenggarakan turwali Lantas (PNBP) Rp. 17.429.000
16) Honor PNBP Rp. 3.600.000,-
17) Biaya listrik Satpas Rp. 123.360,-
18) Biaya telepon satpas Rp. 306.150,-
19) Menyelenggarakan bimbingan, pengayoman dan Linmas Rp. 1.350,-
20) Pembentukan dan pembinaankelompok pengamanan swakarsa Rp. 3.250,-
21) Pemberdayaan Kemitraan Polsek Rp. 1.000,-
22) Asitensi kelompok sadar kamtibmas Rp. 3.064,-

d. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Polri (DUKMAN). Total anggaran untuk program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Polri adalah sebesar Rp.38.835.530.000,- terealisasi sebesar Rp.38.805.277.474,- (99,92%), sisa anggaran sebesar Rp.30.252.526,-, hal ini disebabkan adanya sisa pada kegiatan:

1. Menyelenggarakan Humas Rp. 41.000,-
2. Gaji dan Tunjangan Rp. 20.848.081,-
3. Biaya telepon Rp. 2.285.700,-
4. Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor Polres Rp. 76.460,-
5. Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor Polsek Rp. 499.000,-
6. Daya tahan tubuh Rp. 300,-
7. Rapat – rapat koordinasi Rp. 2.000,-
8. Penegakan hukum anggota/PNS Rp. 763.000,-
9. Pengawasan dan pembinaan Rp. 285,-
10. Penegakan hukum anggota/PNS (Kode Etik) Rp. 5.732.000,-
11. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Rp. 2.000,-

BAB IV

P E N U T U P

1. Pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Resor Tanjungpinang yang telah ditetapkan dalam Renja Kepolisian Resor Tanjungpinang T.A. 2021 serta Perjanjian Kinerja Kepolisian Resor Tanjungpinang T.A. 2021 telah dapat dilaksanakan oleh seluruh Satfung dijajaran Kepolisian Resor Tanjungpinang
2. Permasalahan yang dihadapi :
   a. Belum maksimalnya pelayanan masyarakat di perairan terkendala dengan belum adanya pos pelayanan terapung dan transportasi reguler masih sangat minim.
   b. Masih minimnya personel Kepolisian Resor Tanjungpinang yang memiliki kemampuan bidang IT.
   c. Masih minimnya Personil Kepolisian Resoar Tanjungpinang yang memiliki kemampuan bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan masih personil dari Polda Kepulauan Riau.
3. Peningkatan pelayanan publik Kepolisian Resor Tanjungpinang berupa:
   a. SAMBER (Samsat Bergerak), Samsat Corner, SIM LING, SAM lantas Polres Tanjungpinang;
   b. Aplikasi sistem informasi database;
   c. Website Kepolisian Resor Tanjungpinang (Polrestanjungpinang.id),
   d. Patroli Sinar Biru, Engku Putri, Sambang Desa, dialogis, dan tertib lantas;
   e. Kegiatan Polisi Cilik (Pocil) dan PKS;
   f. Penggalangan dan deteksi dini;
   g. Revolusi mental, pelayanan kesehatan;
4. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja masa mendatang yaitu:
   a. Menampilkan postur anggota Polri dengan menghadirkan sosok Polri di masyakarat, sebagai komitmen Kepolisian Resor Tanjungpinang pasca reformasi Polri khususnya pada aspek kultur dengan perubahan *mindset* dan *cultur set* yang diharapkan masyarakat;
   b. Membangun kemitraan dalam sistem sinergi polisional dengan mengedepankan pola kegotong royongan, membangun kemitraan dengan instansi pemerintah/swasta terkait serta seluruh komponen masyarakat dalam wadah Pemolisian Masyarakat (Polmas) dalam rangka menciptakan tertib hukum;
   c. Pelayanan prima, memberikan pelayanan secara tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan standar etika yang tinggi sampai dengan masyarakat di perairan
   d. Strategi Proaktif policing, perkembangan ke depan perlu dilakukan suatu upaya pola penanganan tindakan reaktif menjadi proaktif sehingga tercipta situasi yang kondusif dengan sasaran meminimalkan jatuhnya korban dan efisiensi anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kepolisian Resor Tanjungpinang T.A. 2021 ini dibuat, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran Polri sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat di wilayah Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 18 Februari 2022
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINEJA
POLRES TANJUNGPINANG
T.A.2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERNANDO, S.H., S.I.K.
Pangkat : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI
Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ARIS BUDIMAN, M.Si.
Pangkat : INSPEKTUR JENDERAL POLISI
Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 5 Januari 2021

Pihak Kedua
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU

Dr. ARIS BUDIMAN, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Pihak Pertama
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNG PINANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Keamanan dan ketertiban masyarakat kota Tanjungpinang.	Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat kota Tanjungpinang.	Nilai 2.1
2.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang.	Indeks Harkamtibmas.	Nilai 76
3.	Penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang.	Indeks Gakkum.	Nilai 91
4.	Profesionalisme SDM Kepolisian Resor Tanjungpinang	Indeks Profesionalitas SDM Kepolisian Resor Tanjungpinang.	Nilai 77
5.	Terbangunnya sarana prasarana Kepolisian Resor Tanjungpinang yang modern.	1. Persentase pemenuhan Alkom;	53%
		2. Persentase pemenuhan Almatsus;	65%
		3. Persentase pemenuhan pembangunan Kepolisian Resor Tanjungpinang;	0
		4. Persentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Kepolisian Resor Tanjungpinang.	100%
6.	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih Terbuka dan Melayani.	1. Nilai AKIP;	Nilai 72,21
		2. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) Kepolisian Resor Tanjungpinang;	Nilai 82,71
		3. Nilai kinerja anggaran;	Nilai 90
		4. Persentase penanganan pengaduan masyarakat;	67,67 %
		5. Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Kepolisian Resor Tanjungpinang.	86 %

Program	Anggaran
1. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Rp. 3.433.225.000,-
2. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	Rp. 12.915.180.000,-
3. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rp. 6.322.228.000,-
4. Program Dukungan Manajemen	Rp. 39.461.879.000,-

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU

Dr. ARIS BUDIMAN, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tanjungpinang, 4 Januari 2021
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

SPRIN POKJA PENYUSUNAN LKIP

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TAJUNGPINANG

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin / 356 /II /REN.4.1.7./2022

Pertimbangan : bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Tanjungpinang TA. 2021 maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar :
1. Rencana Kerja Polres Tanjungpinang T.A 2021;
2. Rujukan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kepolisian Resor Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 nomor : SP DIPA- 060.01.2. 640981 /2021 tanggal 23 November 2021 dengan kode DS :0764-8054-3492-4642;
3. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Kapolda Kepri nomor : B/ 3728 / XI / REN.4.1.7 / 2021 tanggal 25 November 2021 tentang undangan rapat penyusunan Draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021.

D I P E R I N T A H K A N

Kepada : NAMA,PANGKAT, NRP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk
1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai Panitia kelompok kerja penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021;
2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. segala biaya yang ditimbulkan pada surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepoilisian Resor Tanjungpinang;
4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal 7 s/d 19 Februari 2022;
5. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab;

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 12 Februari 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

Tembusan :

1. Kapolda Kepri
2. Itwasda Polda Kepri
3. Karo SDM Polda Kepri
4. Karorena Polda Kepri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

LAMPIRAN SPRIN KAPOLRES TANJUNGPINANG
NOMOR : SPRIN /356/ II/ REN.4.1.7 ./ 2022
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2022

DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LKIP
POLRES TANJUNGPINANG TAHUN 2021

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	FERNANDO,S.H.,S.I.K.	AKBP	KAPOLRES	PEN.JAWAB
2	VERY EDULFANDRIA NOR	KOMPOL	WAKA	KETUA
3	MUKHAROM	KOMPOL	KABAG SDM	WAKIL KETUA
4	AFDAL, SH.	KOMPOL	KABAG REN	SEKRETARIS
5	REZA ANUGRAH ARIEF .P., S.H.,S.I.K.	AKP	KABAG OPS	ANGGOTA
6	SUDARTO, S.IP	AKP	KASAT INTELKAM	ANGGOTA
7	AWAL SYA'BAN HARAHAP,S.I.K	AKP	KASAT RESKRIM	ANGGOTA
8	RONNY BURUNGUDJU, S.H, S.I.K	AKP	KASAT NARKOBA	ANGGOTA
9	AHMAD SYAHPUTRA, S.H	AKP	KASAT SABHARA	ANGGOTA
10	I MADE PUTRA HARI SUARGANA, S.I.K	AKP	KASAT LANTAS	ANGGOTA
11	RUSLI YATNA	AKP	KASAT BIMMAS	ANGGOTA
12	SYAHRUL DAMANIK	IPDA	KASAT TAHTI	ANGGOTA
13	ANJAR YOGOTA WIDODO,S.I.K	KOMPOL	KAPOLSEK PEL.S.B.P	ANGGOTA
14	ADI SUMARDI, S. Kom	KOMPOL	KAPOLSEK B.BESTARI	ANGGOTA
15	M.ARSHA, S.I.K.	AKP	KAPOLSEK TPI KOTA	ANGGOTA
16	SYAFRUDIN ANWAR	AKP	KAPOLSEK TPI TIMUR	ANGGOTA
17	DONRIS E PASARIBU, S.H	AKP	KAPOLSEK TPI BARAT	ANGGOTA
18	SUGIONO	IPTU	KAPOLSEK BANDARA RHF	ANGGOTA
19	ATO HERYANTO	AKP	KASIUM	ANGGOTA
20	SYAFRIL	IPDA	KA SPKT	ANGGOTA
21	SUPRIHADI HANTONO	AKP	PS.KSBG. HUMAS	ANGGOTA
22	SYAMSURYA, S.Sos, M.Si	IPTU	KASIPROPAM	ANGGOTA
23	KHADIRIN	IPTU	KASIWAS	ANGGOTA
24	ELDI SYAHPUTRA	BRIPKA	PS.KASIKEU	ANGGOTA
25	ARMAN NOFRI ANSARI LUBIS	BRIPKA	KASITIPOL	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 12 Februari 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

STRUKTUR ORGANISASI POLRES TANJUNGPINANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNG PINANG

LAMPIRAN : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA RI
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 JANUARI 2021

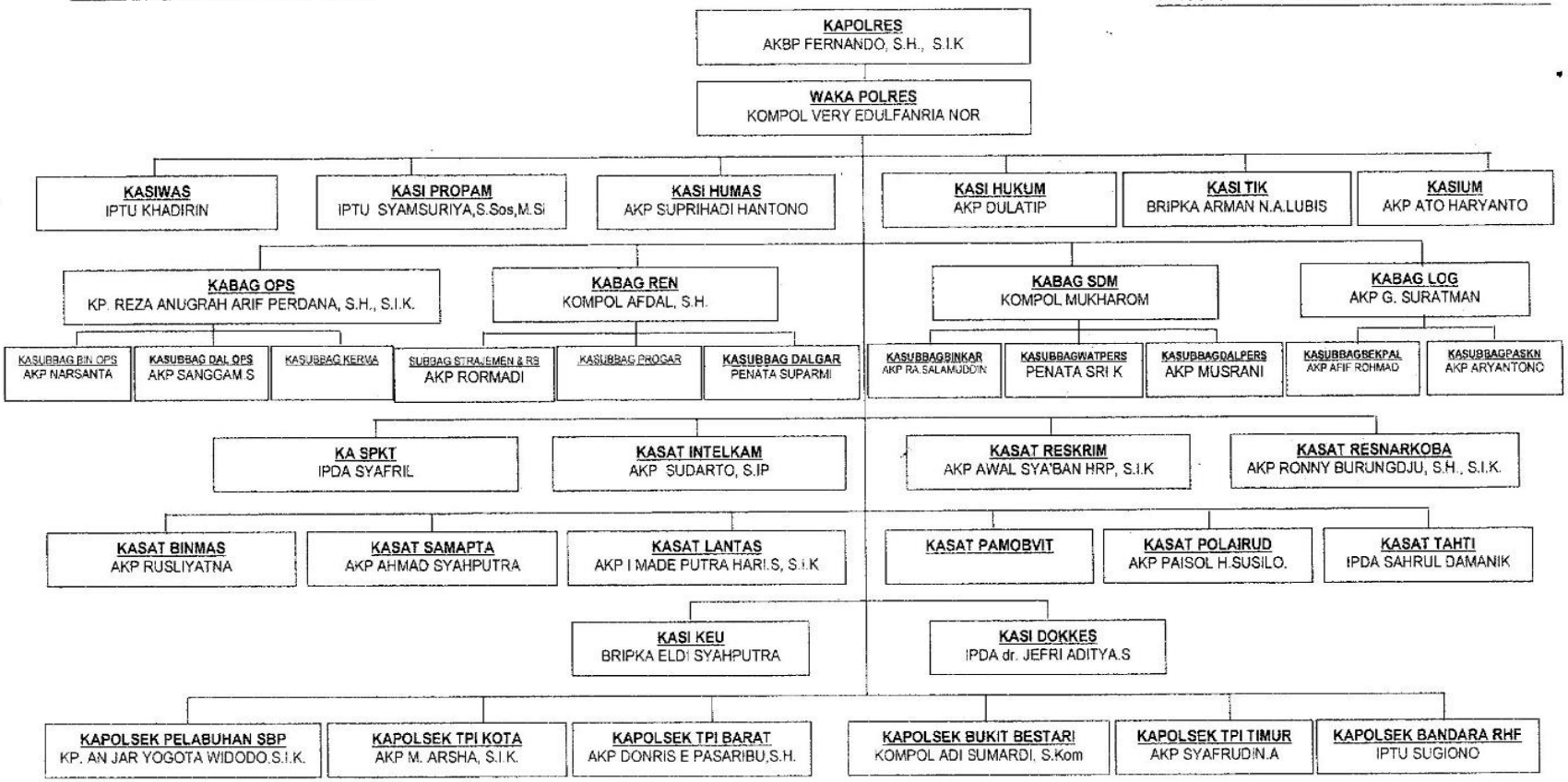

FOTO-FOTO KEGIATAN POLRES TANJUNGPINANG

Penghargaan
DJPb
KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGPINANG
Piagam Penghargaan
Diberikan Kepada
SATKER POLRES TANJUNGPINANG (640981)
sebagai
PERINGKAT III
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik
Kategori Pagu Sedang (Rp 10.000.000.000 s.d Rp 50.000.000.000)
Tanjungpinang, 21 Januari 2021
Kepala KPPN Tanjungpinang
IKPA
Aprijon

Piagam Penghargaan
KPPN
TANJUNGPINANG
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGPINANG
Memberi Penghargaan
PERINGKAT KETIGA
Kepada Satker
POLRES TANJUNGPINANG (640981)
Dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Bendahara Secara Akurat dan Tepat Waktu Periode Triwulan III Tahun 2020
Untuk Dana Kelolaan Uang Persediaan di atas 200.000.000 s.d 1.000.000.000
Tanjungpinang, 16 Oktober 2020
Kepala Kantor
APRIJON
NIP 19700212 199603 1001

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada :

KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

Atas Keberhasilannya Mendapatkan Nilai Pelayanan Publik

KATEGORI SANGAT BAIK "A-"

Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Pada Unit Layanan SKCK Tahun 2020
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Tanjungpinang, 24 September 2021
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, SE., MM

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada :

KAPOLRES TANJUNGPINANG

Atas Partisipasinya dalam Pencapaian Target Vaksinasi Covid-19 diatas 50% pada tanggal 25 Juni 2021 bagi Masyarakat di wilayah Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang, 25 Juni 2021
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, SE,MM

KPPN
TANJUNG PINANG

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGPINANG

MEMBERIKAN

Penghargaan

KEPADA

POLRES TANJUNGPINANG (640981)

PERINGKAT 8

Penyampaian LPJ Bendahara Akurat dan Tepat Waktu Semester I TA 2021
Kategori Uang Persediaan Lebih Dari 200.000.000

Tanjungpinang, 30 Juli 2021
Kepala KPPN Tanjungpinang

APRIJON
NIP. 197002121996031001

KPPN
TANJUNG PINANG

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGPINANG

Memberikan

Penghargaan

Kepada

POLRES TANJUNGPINANG (640981)

Peringkat 8

Penyampaian LPJ Bendahara Akurat dan Tepat Waktu Triwulan I TA 2021
Kategori Uang Persediaan diatas 200.000.000 s.d. 1.000.000.000

Tanjungpinang, 16 Juni 2021
Kepala KPPN Tanjungpinang

APRIJON

FOTO KASUS PEMBUNUHAN

PASARVAS

KASUS PREDATOR ANAK

KASUS ARISAN ONLINE